

**BUKU**

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- alQosbah, T. 2024 . *Al-Qur'an Hafalan Al-Barik*. Bandung: PT. alQosbah Karya Indonesia.
- Bardi, S. 2010. *Pengantar Geografi Desa*. Banda Aceh: Al-Washliyah University Press (AUP).
- Daldjoeni, N. 2010. *Interaksi Desa-Kota*. Bandung: Alumni.
- dkk, C. K. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Emzir. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Gunawan, I. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadi, S. 1991. *Metodologi Reseach II*. Jakarta: Andi Offset.
- Hadjon, P. M. (1987). *Teori Hukum*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Kaelan. 2010. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Magnar, B. M. 2017. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. PT. Alumni: PT. Alumni.
- Mamudji, S. S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.Mardalis. 1995. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Margono, S. 1996. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, L. J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Prof. Chainur Arrasjid, S. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Puspa, Y. P. 2008. *Kamus Hukum*. Semarang: CV. Aneka Ilmu.
- Raharjo, S. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: : PT. Citra Aditya Bakti.
- Ramlan, E. N. 2021. *Hukum Pemerintah Desa*. Medan: Enam Media.
- Sri Mintarjo, E. S. 2019. *Perwilayahan Desa dan Kota*. Klaten: Suka Mitra Kompetensi.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sumadiria, H. 2016. *Hukum & Etika Media Massa*. Bandung: Simbiosis Rekat Media.

### **JURNAL**

Erga Yuhandra, S. A. 2021. Penerapan Asas Keterbukaan dalam Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Kuningan Guna Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Baik. *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 12, No. 1.

Fahmi, A. E. 2021, Juli. Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol. 2, issue 6.

Jafar, W. A. 2018. Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-qur'an dan As-Sunnah. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1.

Khairunnisa. 2022. Kurangnya Kesadaran Masyarakat terhadap Hukum Berlalu Lintas di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol.2 No. 6.

Muthalib, S. A. 2019. iyasah Dusturiyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an. *Jurnal of Qur'anic Studies*, Vol. 2. No. 2.

Setyowati, E. 2019. Tata Kelola Pemerintahan Desa Pada Perbedaan Indeks Desa Membngun (IDM): Studi Tiga Desa di Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 9, No. 2.

Solechan. 2019. Asas-Asas Umum Pemerintahan yan Baik dalam Pelayanan Publik. *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 2 issue 3

Sugiman. 2018, juli. Pemerintahan Desa. *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 1.

### **WAWANCARA :**

Hasil Wawancara bersama Bapak Kyai Ahmad pada Selasa, 14 Mei 2024 Ulinnuha di Kediaman Bapak Kyai Ahmad Ulinnuha .

Hasil Wawancara bersama Bapak Tramika Adi Martono pada Senin, 6 Mei 2024 di Kantor Desa Kalipucung.

Hasil Wawancara bersama Ibu Nur Afifah pada Senin, 13 Mei 2024 di kediaman Ibu Nur Afifah.

Hasil Wawancara bersama Ibu Qurotul Aini pada Senin, 13 Mei 2024 di kediaman Ibu Qurotul Aini.

Hasil Wawancara bersama Muhammad Irfan Fatoni pada Sabtu, 11 Mei 2024 di kediaman Bapak Widodo.

Hasil Wawancara bersama Rofiatul Munawaroh pada Sabtu, 11 Mei 2024 di kediaman Bapak Sugeng Pramono.

Hasil Wawancara bersama Sekretaris Desa pada Senin, 6 Mei 2024 di Kantor Desa Kalipucung.

Hasil Wawancara bersama Sekretaris Desa pada Senin, 6 Mei 2024 di Kantor Desa Kalipucung.

Hasil Wawancara bersama Yanuar Angga Dwi Saputra pada Sabtu, 11 Mei 2024 di kediaman Bapak Agus Prasetyo.

Hasil Wawancara bersama Bapak Sulistiyono pada Senin, 13 Mei 2024 di kediaman Bapak Sulistiyono.

### **PERATURAN**

Undang-undang No 34 Th 2004 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 pasal 6 ayat 2

### **WEBSITE**

“Hukum Online”, Artikel di akses di <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-cacat-hukum-1t556fa8a2b1100/> pada tanggal 16 Mei 2024.